

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

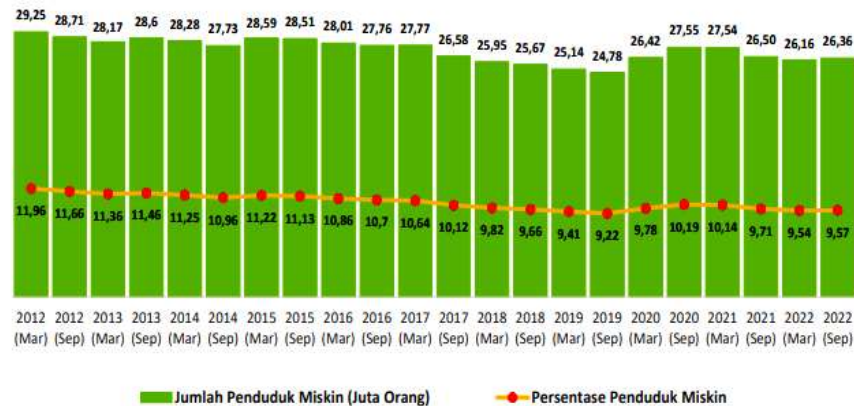
Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh berbagai negara didunia, termasuk Indonesia sebagai negara berkembang. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang atau anggota masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang wajar sebagaimana anggota masyarakat lain umumnya. Kemiskinan adalah sesuatu yang berhubungan dengan keadaan fisik yang dicirikan oleh ketidacukupan dalam arti untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk nutrisi, perumahan, kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan mempunyai beragam manifestasi kelaparan seperti buta huruf, miskin kesehatan, pakaian dan perumahan di bawah standar, rentan terhadap kejadian-kejadian dan kondisi degradasi lingkungan dan keamanan.²

Kemiskinan merupakan masalah utama yang dihadapi negara-negara berkembang di dunia, termasuk Indonesia. Kemiskinan sebagai akibat dari berkurangnya pendapatan masyarakat secara riil. Masyarakat mengalami penurunan daya beli barang-barang kebutuhan pokok secara

² M. Nasir, dkk, *Analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Jumlah Penduduk Miskin*, (Malang: UNBRA, 2008).

umum. Akibatnya, masyarakat tidak dapat hidup secara layak sehingga taraf hidupnya menurun.³

**Gambar 1.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan
Maret 2012- September 2022**



Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2022

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, presentase penduduk miskin di Indonesia pada periode September 2022 sebesar 9,57 persen, meningkat 0,03 persen poin terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14 persen poin terhadap September 2021. Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang, meningkat 0,20 juta orang terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14 juta terhadap September 2021. Presentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 sebesar 7,50 persen, naik menjadi 7,53 persen pada September 2022. Sementara presentase penduduk miskin pedesaan pada Maret 2022 sebesar 12,29 persen naik menjadi 12,36 persen pada September 2022.

Indonesia merupakan negara terkaya akan sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam ini merupakan salah satu sumber pendapatan negara, sehingga kekayaan yang dimiliki Indonesia menjadi incaran negara-negara maju lainnya. jika pemanfaatan dan pengelolaan

³ Wahyuni, *Penanggulangan Kemiskinan dalam Tinjauan Sosiologi Terhadap dampak Pembangunan*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), hlm. 34.

sumber daya alam dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan memanfaatkan masyarakat yang ada maka pendapatan negara semakin bertambah dan tentu angka kemiskinan di Indonesia semakin menurun. Dibandingkan negara-negara maju yang jumlah penduduknya lebih banyak namun angka kemiskinan jauh lebih baik dibandingkan Indonesia, lantas peran apa saja yang perlu dilakukan untuk mengentaskan angka kemiskinan di Indonesia. peran masyarakat dan pemerintah khususnya sangat membantu dalam mengupayakan perekonomian Indonesia yang lebih baik agar kesejahteraan tiap-tiap rumah tangga terwujud secara merata.

Tabel 1.1 Presentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2022

Provinsi	Presentase Penduduk Miskin (%)		Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	
	Mar'22	Sep'22	Mar'22	Sep'22
DI Yogyakarta	11,34	11,49	454,76	463,63
DKI Jakarta	4,69	4,61	502,04	494,93
Aceh	14,64	14,75	806,82	818,47
Jawa Timur	10,38	10,49	4.181,29	4.236,51
Jawa Barat	8,06	7,98	4.070,98	4.053,62
Jawa Tengah	10,93	10,98	3.831,44	3.858,23

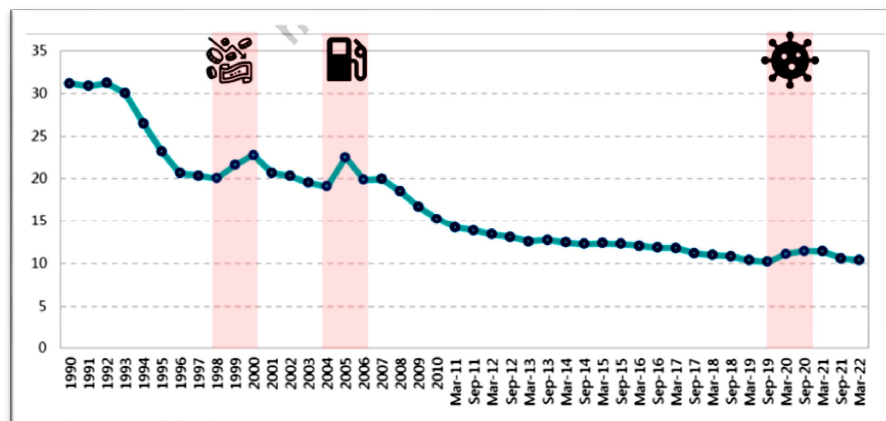
Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui DI Yogyakarta dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit yaitu 454,76 ribu pada Maret 2022 dan 463,63 ribu pada September 2022. Seperti yang diketahui Jawa Timur merupakan tempat bermukim penduduk miskin terbanyak se-Indonesia. Pada Maret 2022 sebanyak 4.181,29 ribu penduduk miskin atau sekitar 15,98 persen penduduk miskin Indonesia tinggal di provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak. Dapat diartikan, sebanyak 4.181,29 ribu orang ini belum tercukupi kebutuhan dasarnya agar dapat beraktifitas fisik secara normal

(karena konsumsi kalorinya belum mencapai 2100 kkal perkapita perhari) dan beraktifitas sosial di masyarakat.⁴

Meski angka kemiskinan Jawa Timur terbilang cukup rendah sebesar 10,38 persen pada Maret 2022, dan 10,49 persen pada September 2022, jumlah penduduk miskin absolutnya terbilang paling tinggi seiring besarnya jumlah penduduk. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pembangunan Jawa Timur, karena Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki kabupaten/kota terbanyak di Indonesia. Selain itu, Jawa Timur juga menggambarkan dengan menjadi provinsi yang memiliki daerah terbanyak.

Gambar 1.2 Tren Angka Kemiskinan Jawa Timur Tahun 1990-2022



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

Presentase penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 10,38 persen dan September 2022 sebesar 10,49 persen, menurun 0,10 persen poin terhadap September 2021. Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 4,236 juta orang, menurun 23,09 ribu orang terhadap September 2021. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan perekonomian pasca pandemi covid-19 dapat dikatakan baik. Penurunan angka kemiskinan di

⁴ Aldizah Dajustia Hutami DKK., *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2022*, (Jawa Timur:BPS Provinsi Jawa Timur,2022), hlm. 69

Jawa Timur tersebut didorong oleh meningkatnya upah minimum regional (UMR) setiap wilayah, angka kesehatan dan tingkat pendidikan yang lebih baik, pengangguran yang semakin berkurang, dan masih banyak faktor lainnya.

Sebagaimana kemiskinan di Indonesia, Kemiskinan Jawa Timur juga terus mengalami penurunan, kecuali untuk beberapa tahun. Saat krisis Asia 1997/1998 kemiskinan Jawa Timur meningkat dari 20,08 persen pada tahun 1998 menjadi 22,77 persen pada tahun 2000. Tambah lagi, kenaikan harga pangan dan bahan bakar minyak global tahun 2005. Meningkatkan angka kemiskinan Jawa Timur dari 19,1 persen pada tahun 2004 menjadi 22,51 persen pada tahun 2005. Dan sebelum mencapai angka 10 persen, angka kemiskinan Jawa Timur naik kembali akibat pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020.⁵

Berdasarkan fenomena di lapangan, kemiskinan merupakan salah satu permasalahan multidimensi, masyarakat miskin yang membutuhkan kemampuan pada tingkat individu (seperti kesehatan, pendidikan dan perumahan) dan pada tingkat kolektif (seperti bertindak bersama untuk mengatasi masalah. Kemiskinan terjadi karena terdapat keluarga yang masih belum memiliki pekerjaan, tidak mampu membiayai untuk kehidupan sekolah dan kesehatan, serta untuk pengeluaran pun masih sangat minim. banyak faktor yang mempengaruhi, tolak ukur kemiskinan di masyarakat dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Masyarakat miskin sebagai orang yang mengalami kekurangan pendapatan dan sumber daya lain: makanan, material, fasilitas, harga diri, dan layanan.⁶ Fenomena saat ini rata-rata masyarakat miskin diasumsikan tidak mampu memainkan peran pribadi dan sosialnya, baik di perkotaan ataupun di pedesaan.

⁵ Aldizah Dajustia Hutami DKK., *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2022*, (Jawa Timur:BPS Provinsi Jawa Timur,2022), hlm. 69.

⁶ *Ibid*, hlm. 68.

Menurut Mudrajad secara mikro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah, kemiskinan juga muncul akibat perbedaan sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berdampak pada produktifitas yang rendah sehingga upayanya rendah. Faktor lainya seperti malas bekerja, keterbatasan sumber daya alam, beban keluarga, pengangguran, dan pendidikan yang merupakan pengaruh tingkat kemiskinan. Menurut Mudrajad Kuncoro penyebab kemiskinan berdasarkan sisi ekonomi adalah (1) kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya yang terbatas dan kualitasnya rendah. (2) kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, sehingga upah yang didapatkannya pun rendah. (3) kemiskinan muncul karena perbedaan akses modal. Bahwa penyebab kemiskinan dan keterbelakangan adalah persoalan aksesibilitas. Akibat keterbatasan dan ketersediaan akses manusia mempunyai keterbatasan dalam memilih.⁷ Menurut Hartomo dan Aziz ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan yaitu pendidikan yang terlampau rendah, malas bekerja, keterbatasan sumber alam, terbatasnya lapangan kerja, keterbatasan modal⁸.

Banyaknya faktor kemiskinan menurut para ahli, peneliti memilih jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, pengangguran, dan upah minimum sebagai faktor penyebab kemiskinan di Jawa Timur yang akan diteliti, karena keempat faktor tersebut signifikan untuk diteliti di Provinsi Jawa Timur yang merupakan daerah terbanyak serta penduduk terbanyak di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi bertambahnya angka kemiskinan yaitu jumlah penduduk. Penduduk merupakan sekelompok orang yang

⁷Mudrajad Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*, (UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2006).

⁸ Hartomo, Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 67.

tinggal di wilayah negara dalam kurun waktu minimal enam bulan serta tinggal minimal enam bulan namun dengan maksud menetap. Kenaikan jumlah penduduk yang terus menerus merupakan unsur yang perlu untuk menunjang tambahan permintaan, namun disisi lain kenaikan jumlah penduduk yang tinggi dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi yang imbasnya prospek pengurangan kemiskinan dan upaya pembangunan semakin jauh.⁹ Penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah adalah masalah mendasar. Jumlah penduduk yang besar dapat menggerakkan pasar dari permintaan melalui *multiplier effect* karena adanya *aggregat demand*. Karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali tersebut dapat mengakibatkan kegagalan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi, yaitu kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Mengingat jumlah penduduk berkaitan sekali dengan pembangunan ekonomi maka diharapkan suatu negara mampu menciptakan penduduk yang berkualitas agar pertumbuhan ekonomi semakin meningkat.

Sumber Daya Manusia berperan ganda dalam pembangunan ekonomi, baik sebagai objek dan subjek pembangunan. Sebagai objek pembangunan, SDM merupakan sasaran pembangunan untuk mendapatkan kesejahteraan. Sedangkan sebagai subjek pembangunan, SDM berperan sebagai pelaku pembangunan yang menentukan kemajuan.¹⁰ Untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia di Indonesia dapat dilihat dari ukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM yang merupakan tolok ukur pembangunan suatu wilayah sebaiknya berkorelasi negatif terhadap kondisi kemiskinan di wilayah tersebut karena diharapkan suatu daerah yang memiliki IPM tinggi, idealnya kualitas hidup

⁹ Hilmi DKK, "Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Tolitoli" Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan Vol. 1 No. 1 (2022): 20.

¹⁰ Nurul Huda, dkk., *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), Hlm. 17

masyarakat juga tinggi atau dapat dikatakan pula bahwa jika nilai IPM tinggi, maka seharusnya tingkat kemiskinan masyarakat akan rendah.¹¹

Menurut Sadono Sukirno pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan.¹² Pengangguran merupakan salah satu faktor yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat apabila tingkat pendapatan, penghasilan penduduk mencapai maksimum dan kondisi tingkat pemakaian tenaga kerja penuh (*full employment*) bisa terwujud. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat berarti produksi barang/jasa yang dihasilkan meningkat. Dengan demikian diperlukan tenaga kerja semakin banyak untuk memproduksi barang/jasa tersebut sehingga pengangguran dan kemiskinan semakin menurun. Upaya penurunan tingkat pengangguran sangat berkaitan dengan kemiskinan. Secara teori jika masyarakat tidak menganggur berarti mempunyai pekerjaan dan penghasilan, dan dengan penghasilan yang dimiliki dari bekerja diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Jika kebutuhan hidup terpenuhi, maka tidak akan miskin.¹³

Kebijakan penetapan upah minimum adalah suatu upaya yang dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat agar mampu memenuhi standar hidup minimumnya. Upah minimum diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan upah rendah. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Salah satu kebijakan yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat adalah kebijakan upah minimum.. Setiap wilayah di negara

¹¹ Sayifullah dan Tia Ratu Gandasari, “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten”, Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol. 6, No. 2, (2016), hlm. 115-273

¹² Sadono Sukirno, Makroekonomi, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015)

¹³ Yarlina Yacoub, “Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat”, Jurnal EKSOS Vol. 8 No. 3, (2012): 177.

Indonesia mempunyai tingkat upah minimum yang berbeda-beda. Tahun ke tahun upah minimum regional (UMR) umumnya selalu mengalami kenaikan. Upah minimum dianggap mampu mengurangi tingkat kemiskinan apabila nilai upah minimum riil nya lebih besar dari tingkat inflasi yang berlaku saat itu. Selain itu produktivitas dari para pekerjanya juga harus tinggi sehingga daya beli riil masyarakat tidak mengalami penurunan.¹⁴

Tabel 1.2 Jumlah Kabupaten/Kota Terbanyak di Indonesia

No.	Provinsi	Kabupaten	Kota	Jumlah Kab/Kota
1	Jawa Timur	29	9	38
2	Jawa Tengah	29	6	35
3	Sumatera Utara	25	8	33
4	Papua	28	1	29
5	Jawa Barat	18	9	27

Sumber: BPS Indonesia Tahun 2022

Alasan pemilihan lokasi di Jawa Timur karena merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak dengan jumlah 29 kabupaten dan 9 kota, banyaknya kota/kabupaten juga berpengaruh pada banyaknya penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk maka pemerintah harus extra dan waspada dalam peran mengentaskan kemiskinan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur menempati posisi penduduk miskin terbanyak di Indonesia yaitu sebanyak 4.236,51 ribu jiwa pada September. Dilihat dari pertumbuhan ekonomi dalam mengentaskan kemiskinan, Jawa Timur masih berada dibawah Provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota lebih sedikit dibandingkan Jawa Timur dan juga kondisi pertumbuhan masih bersifat fluktuatif.

¹⁴ Sari Nurmalisa Sungkar, Nazamuddin, dan Muhammad Nasir, "Pengaruh Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia", Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Volume 3, No. 2, (2015): 9.

Adapun alasan peneliti mengambil topik kemiskinan karena kemiskinan merupakan masalah utama yang dihadapi negara-negara berkembang di dunia, termasuk Indonesia. Di Jawa Timur angka kemiskinan sangat perlu di perhatikan lagi, Jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia menjadi tugas berat bagi pemerintah bagaimana untuk mengentaskan angka kemiskinan tersebut. Kemiskinan berkaitan sekali dengan pembangunan ekonomi. pertumbuhan ekonomi yang baik maka akan memberikan dampak baik bagi masyarakat juga. Jumlah penduduk yang semakin banyak namun berkualitas dalam tingkat pendidikan, kesehatan, ibadah, sosial dan lain sebagainya akan mempermudah dalam mencari lowongan pekerjaan dan mendapatkan upah yang sesuai dengan keahliannya. semakin banyak masyarakat yang bekerja maka tingkat pengangguran juga akan semakin menurun.

Sebagai upaya menunjukkan adanya keterbaruan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, maka peneliti berusaha untuk membandingkan variabel yang berbeda yang sudah dilakukan berdasarkan tema angka kemiskinan. Menurut Hilmi dkk¹⁵, pada penelitiannya tidak menggunakan variabel IPM dan upah minimum. Menurut Suprihatin Lestari dan Ria Repa Susana¹⁶ pada penelitiannya tidak menggunakan variabel jumlah penduduk dan IPM. Menurut Ema Dian Ristika dkk¹⁷, penelitiannya tidak menggunakan variabel upah minimum. Menurut Putri Erian dan Cut Putri Mellita Sari¹⁸ pada penelitiannya tidak menggunakan variabel pengangguran dan jumlah penduduk. Sehingga

¹⁵ Hilmi, Dkk., *Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Tolitoli*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan Vol. 1 No 1 (2022)

¹⁶ Suprihatin Lestari dan Ria Repa Susana, *Analisis Pengaruh Upah Minimum dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Serta Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi*, Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah Vol.4 No.1 (2021)

¹⁷ Ema Dian Ristika, Dkk., *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur*, EKSIS: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Vol 12. No.2 (2021).

¹⁸ Putri Erian dan Cut Putri Mellita Sari, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Kabupaten Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Simalungun*, Jurnal Aplikasi Ilmu Ekonomi Vol. 1 No.1 (2022).

terlihat jelas bahwa tidak ada yang mengkaji secara khusus mengenai pengaruh jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, pengangguran, dan upah minimum terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Disini dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan masih tergolong baru dan belum banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Dari beberapa permasalahan yang telah dipaparkan dan terdapat data dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur yang menunjukkan data presentase kemiskinan menurut Provinsi di Indonesia. Maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian **“Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Jawa Timur”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Kemiskinan merupakan masalah utama yang dihadapi negara-negara berkembang di dunia, termasuk Indonesia. Kemiskinan sebagai akibat dari berkurangnya pendapatan masyarakat secara riil. Masyarakat mengalami penurunan daya beli barang-barang kebutuhan pokok secara umum.
2. Angka kemiskinan Jawa Timur terbilang cukup rendah, namun jumlah penduduk miskin absolutnya terbilang paling tinggi seiring besarnya jumlah penduduk. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pembangunan Jawa Timur, karena Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki kabupaten/kota terbanyak di Indonesia. Selain itu, Jawa Timur juga menggambarkan dengan menjadi provinsi yang memiliki daerah terbanyak.
3. Terjadi penurunan presentase dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2022 dari tahun sebelumnya, dimana Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di antara provinsi lain di Pulau Jawa.

4. Faktor jumlah penduduk, kualitas SDM, pengangguran, dan upah minimum menjadi faktor yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Jawa Timur.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Timur?
2. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Timur?
3. Apakah pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Timur?
4. Apakah upah minimum berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Timur?
5. Apakah jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, pengangguran, dan upah minimum secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Timur?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Jawa Timur
2. Untuk menguji pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Jawa Timur
3. Untuk menguji pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Timur
4. Untuk menguji pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan di Jawa Timur

5. Untuk menguji pengaruh jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, pengangguran, dan upah minimum secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Timur

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan menambah pengetahuan mengenai pengaruh jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, pengangguran, dan upah minimum serta dapat dijadikan sebagai referensi/acuan bagi peneliti selanjutnya.

2. Secara praktis

- a. Bagi Pemerintah

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sarana informasi untuk pemerintah Jawa Timur mengenai pengaruh jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, pengangguran, dan upah minimum. Serta dapat dijadikan sebagai catatan untuk terus meningkatkan kualitas daerah atau dengan mempertahankan kualitas yang sudah cukup baik.

- b. Bagi Akademik

Diharapkan dari hasil penelitian ini memberikan manfaat dalam menambah wawasan dan referensi, khususnya bagi mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Serta dapat menjadi sumbangsih untuk perpustakaan di UIN Syarif Ali Rahmatullah Tulungagung.

- c. Bagi peneliti lain

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran atau bahan rujukan bagi peneliti yang mengadakan penelitian serupa.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan suatu batasan yang memudahkan untuk dilaksanakannya suatu penelitian agar lebih efektif

dan efisien untuk memisahkan aspek tertentu sebuah objek. Ruang lingkup dan batasan masalah yang diberikan dalam penelitian bertujuan untuk menghindari adanya pembahasan yang meluas dari tema studi ini. Adapun variabel-variabel yang dikaji dan diteliti dalam penelitian ini berfokus pada variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk (X1), indeks pembangunan manusia(X2), pengangguran (X3), dan upah minimum (X4) sedangkan variabel terikat (Y) adalah Kemiskinan.

2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini tidak hanya meliputi terbatasnya waktu, dana, dan tenaga yang digunakan untuk melakukan penelitian. Tetapi juga meliputi terbatasnya variabel makroekonomi yang menjadi indikator yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Untuk itu penelitian ini peneliti hanya berfokus pada faktor jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, pengangguran, dan upah minimum dengan jumlah populasi 38 Kota/Kabupaten yang ada di Jawa Timur pada tahun 2017-2022

G. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka penulis akan mengemukakan pengertian dari beberapa istilah kunci dalam skripsi ini, yaitu:

1. Definisi Konseptual

a. Kemiskinan

Kemiskinan adalah kurangnya suatu pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok atau dasar. Mereka yang dikatakan berada di garis kemiskinan adalah apabila tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Kemiskinan itu terjadi biasanya ketidakmerataan terhadap sumberdaya ekonomi.¹⁹

¹⁹ Joseo, *Konsep dan Strategi Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan*, (Jakarta: INDOCAMP, 2018), hlm. 7

Kemiskinan merupakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar seseorang untuk hidup secara normal. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan.²⁰

b. Jumlah Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk disuatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dari pada waktu sebelumnya. Pertambahan penduduk yang cepat menimbulkan masalah yang serius bagi kesejahteraan dan bagi pembangunan, oleh karena itu besarnya jumlah penduduk jika tidak diimbangi oleh dukungan ekonomi yang tinggi akan menimbulkan berbagai masalah seperti kemiskinan dan ketidakstabilannya kondisi nasional secara keseluruhan.²¹

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia adalah indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.²² Pembangunan manusia sendiri yaitu suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk dalam hal pendapatan, kesehatan, pendidikan, lingkungan fisik dan sebagainya.

d. Pengangguran

Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum memulai bekerja.²³

e. Upah Minimum

Upah minimum adalah jumlah minimum yang harus

²⁰ Ali Khomsan dkk, *Indikator Kemiskinan dan Misklasikasi Orang Miskin*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 11

²¹ Badan Pusat Statistik, 2015.

²² Badan Pusat Statistik

²³ Badan Pusat Statistik, 2010.

dibayarkan kepada sebagian besar pekerja disuatu negara, yang pada umumnya berdasarkan jam, harian, atau bulanan, dan yang ditetapkan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan minimum pekerja dan keluarganya, dengan mengingat kondisi ekonomi dan social nasional yang berlaku.²⁴

2. Definisi Operasional

Berdasarkan definisi konseptual yang telah dijelaskan sebelumnya, maka secara operasionalnya yang dilakukan untuk mengetahui penelitian tentang “Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Jawa Timur” adalah melakukan penganalisisan untuk menguji dan mengetahui secara rinci tentang pengaruh jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, pengangguran, dan upah minimum terhadap kemiskinan di Jawa Timur.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam skripsi disusun menjadi tiga bagian, yaitu: Bagian Awal, Bagian Utama, dan Bagian Akhir.

1. Bagian Awal

Terdiri dari Halaman Sampul Depan, Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Halaman Pengesahan, Motto, Halaman Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Lampiran, dan Abstrak.

2. Bagian Utama

Dalam bagian ini terdapat lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

yang diuraikan menjadi beberapa subbab meliputi:
Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Ruang

²⁴ Wayan Gde Wiryawan, *Ironi Upah Minimum dalam Industri Pariwisata*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015), hlm. 54

Lingkup dan Keterbatasan Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI,

yang membahas semua variabel diantaranya jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, pengangguran, upah minimum, dan kemiskinan berdasarkan pada Teori, Penelitian Terdahulu, Kerangka Konseptual, serta Hipotesis Penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN,

yang mencakup beberapa sub bab yaitu Jenis Penelitian, Populasi, Sampling Dan Sampel Penelitian, Sumber Data, Variabel Dan Skala Pengukurannya, Teknik Pengumpulan Data dan Instrument Penelitian, serta Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis. Dalam bab ini dijelaskan mengenai hasil penelitian yang selanjutnya pada bab kelima akan dibahas mengenai pembahasan dari hasil penelitian tersebut.

BAB V PEMBAHASAN

berisi data penelitian dan hasil analisis data. Di bab ini akan diuraikan secara lengkap mengenai hasil penelitian dan akan disimpulkan bab keenam.

BAB VI PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran atau rekomendasi.

3. Bagian Akhir Terdiri dari Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran, dan Daftar Riwayat Hidup.